

## **BAB II**

### **PROGRAM PENGEMBANGAN NUKLIR IRAN**

Pada Bab II ini menjelaskan sejarah, latar belakang, tujuan program nuklir Iran pasca revolusi islam serta penerapannya pada pemerintahan Ahmadinejad dan menjelaskan penerapan NPT pada Iran.

#### **A. Sejarah Pengembangan Dan Tujuan Program Nuklir Iran**

Pengembangan program nuklir dimulai pada pertengahan tahun 1960 pada masa pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlevi atas dukungan Amerika Serikat dalam kerangka kerja perjanjian bilateral antar dua negara tersebut. Shah Mohammad Reza Pahlevi yang pro dengan Amerika Serikat memiliki konsep kepemimpinan yaitu harapan yang kuat atas peranan Iran di kawasan timur tengah dan dunia Internasional. Amerika Serikat dan Iran menandatangani *Nuclear Cooperation Agreement* pada tahun 1957 yang mulai berlaku pada 1959 (Burr, 2009). Meskipun resmi dimulai pada tahun 1957, program nuklir Iran berjalan relatif lambat sampai dengan tahun 1960 ketika Amerika Serikat mensuplai 5MW reaktor termal (*thermal research reactor*).

Perjanjian tersebut kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah Iran dengan membangun Pusat Penelitian Nuklir di Universitas Teheran pada tahun 1959 (Poneman, 1982). Yang kemudian resmi didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh AEOI (*Atomic Energy Organization of Iran*), dimana Pemerintah Iran ketika itu mulai menjajaki kemungkinan sumber energi lain yang berbasis non-minyak. Amerika Serikat juga

membantu suplai kebutuhan-kebutuhan bahan baku untuk program nuklir Iran yang dilakukan pada tahun 1967, diantaranya adalah 5.545 kg Uranium yang telah diproses, dimana 1.165 kg merupakan *fissile isotope* adalah bahan kimia yang digunakan dalam proses pengolahan Uranium yang dibutuhkan sebagai bahan bakar untuk pusat penelitian. Amerika Serikat juga mensuplai 112 g Plutonium, dimana 104 g adalah merupakan *fissile isotope* yang dipakai sebagai sumber energi untuk pusat penelitian nuklir.

Pusat pengembangan ini menjadi salah satu fasilitas nuklir utama Iran yang diketahui publik yang memiliki 5 megawatt reaktor nuklir yang disuplai oleh Amerika Serikat pada tahun 1967. Reaktor ini mampu memproduksi hingga 600 gram plutonium pertahun. Pada tahun 1968 tepatnya 1 Juli, ketika pertama kali dibuka untuk persetujuan internasional, Iran menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty). Penandatanganan perjanjian ini memungkinkan Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Kemudian pada 13 Maret 1969 Amerika Serikat menyetujui amandemen yang diusulkan oleh Iran terhadap Perjanjian Kerjasama antara Iran-Amerika Serikat mengenai penggunaan energi nuklir untuk tujuan sipil yang pernah disetujui sebelumnya pada tahun 1957 yang memperpanjang jangka waktu kerja sama sampai dengan 10 tahun kemudian. Setelah menandatangani perjanjian NPT saat pertama kali dibuka pada 1968, pada tahun 1970 Iran meratifikasi NPT yang kemudian diikuti oleh pernyataan resmi dari pemerintah Iran pada tahun 1972, yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu 10 tahun kedepan pemerintah Iran bermaksud untuk mewujudkan fasilitas pembangkit tenaga nuklir. Pernyataan tersebut kemudian

diawali oleh penelitian resmi yang dilakukan oleh Kementrian Air dan Energi Iran mengenai kemungkinan pembangunan fasilitas pembangkit nuklir di wilayah selatan Iran.

Kondisi regional Timur Tengah pada era Shah Reza Pahlevi juga memiliki kontribusi yang cukup besar pada pembentukan dan perkembangan program nuklir Iran. Perang Arab-Israel yang berlangsung pada tahun 1973, dan kemudian diikuti oleh kenaikan besar pada harga minyak, menyebabkan pemerintahan Shah Reza Pahlevi mempertimbangkan alternatif sumber daya lain yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pembangunan Iran. Melalui sebuah penelitian di Stanford Research Institute yang berbasis di Amerika Serikat memprediksikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan energinya, Iran perlu mengembangkan sumber energi alternative berbasis non-minyak. Disamping itu *Stanford Research Institute* juga menyarankan pembangunan fasilitas nuklir yang mampu menyalurkan 20.000 megawatt listrik sebelum tahun 1994 (Zarif, *Tackling The Iran-US Crisis: The Need for A Paradigm Shift*, 2007, p. 80).Bersamaan dengan pelatihan teknisi nuklir Iran yang salah satunya dilaksanakan di Amerika Serikat.Program nuklir Iran tidak hanya mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat, tetapi juga negara barat lainnya seperti Perancis dan Jerman.

Setelah terus menerus dilakukan upaya-upaya pengembangan teknologi nuklir, pada tahun 1998 pemerintah Iran mengumumkan lebih dari 15 fasilitas dan instalasi baru yang dimiliki oleh Iran (Sahimi, 2003).Antara lain adalah; sepuluh tambang Uranium yang tersebar di daerah Provinsi Yazd, Khorrasan, Baluchestan, Harmozgan, Bandar E-Abbas, Bandar E-Langeh di sepanjang Teluk, dan Pusat nuklir Karaj yang rencananya akan dikembangkan sebagai pusat penelitian riset medis dan agrikultur. Laboratorium

Ibnu Haytam, Teheran yang direncanakan sebagai pusat penelitian laser, *Bonab Atomic Energy Research Center* yang juga direncanakan sebagai fasilitas pengembangan teknologi Agrikultur, pusat penelitian riset nuklir medis di Isfahan, dua reaktor di Busher. Bushehr adalah reaktor nuklir pertama yang dibangun dan dimiliki Iran pada tahun 1975, untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di kota Shiraz. Bushehr juga merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama Iran. [Reaktor nuklir](#) ini berjenis reaktor air ringan dan dibangun oleh Rosatom, sebuah perusahaan tenaga nuklir sipil milik pemerintah [Rusia](#) (Bushehr). Pusat pengayaan Uranium di Natanz, pusat pengalihan bijih Uranium di Saghand, fasilitas reaktor air di Arak, dan *Teheran Nuclear Research Center* yang dioperasikan oleh AEOI (*Atomic Energy Organization of Iran*) yang memiliki kemampuan untuk memproduksi 600 gram plutonium tiap tahunnya, serta yang terakhir adalah fasilitas penampungan bahan-bahan nuklir di Ardekan yang siap beroperasi sejak pertengahan 2005.

Asadollah Saburi, Wakil Kepala AEOI (*Atomic Energy Organization of Iran*) pada Maret 2001 mengutarakan bahwa 50 persen dari proses pembangunan reaktor kesatu di Bushehr telah selesai. Yang kemudian disusul dengan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Presiden Russia Vladimir Putin dengan Presiden Iran Mohammad Khatami mengenai pembangunan reaktor kedua setelah yang pertama selesai dibangun di Bushehr (Russia, Iran Confirm Adherence to Nuclear Nonproliferation , 2000). Upaya Iran dalam mengembangkan program nuklirnya ini mendapatkan dukungan dari negara-negara non-blok. Pada September 2003 dalam pertemuan *Board of Governors IAEA*, perwakilan negara non-blok memuji dan mendukung upaya Iran untuk mengembangkan teknologi

nuklir, dan menyatakan bahwa setiap anggota NPT memiliki hak untuk mengembangkan program nuklir damai.

Pada bulan Desember tahun 2003 Iran menanggihkan seluruh aktifitas pengayaan uranium secara suka rela dan bersifat sementara. Penanggihan ini diputuskan setelah sebelumnya melalui rangkaian negosiasi dengan UE3 (Jerman, Inggris dan Perancis), Iran diminta untuk menanggihkan aktifitas pengayaan di Natanz, dan juga penanggihan seluruh aktifitas nuklir Iran. Namun Pada September 2004, Presiden Khatami menyatakan bahwa Iran akan meneruskan program nuklirnya, pernyataan tersebut didukung oleh Menteri Luar Negeri Kamal Kharazmi yang menyatakan bahwa Iran tidak akan memproduksi senjata nuklir apabila hak sah Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir damai diakui (Dareini, 2004).

## **B. Penerapan Program Nuklir Iran Presiden Ahmadinejad**

Pada tanggal 6 Agustus 2005, Mahmud Ahmadinejad secara resmi menjabat sebagai Presiden Republik Islam Iran yang ke enam. Sebagaimana para pendahulunya Presiden Mahmud Ahmadinejad menempatkan program nuklir Iran sebagai sebuah prioritas dalam rangkaian kebijakan pemerintahannya. Pada tahun 2005, respon Amerika Serikat dan negara-negara barat terhadap program nuklir Iran semakin gencar beberapa spekulasi tentang kelanjutan program nuklir ramai menjadi topik pembahasan terutama setelah pergantian Presiden. Presiden Ahmadinejad dipandang sebagai tokoh Konservatif garis keras dengan latar belakang revolusioner yang dipandang cenderung menggunakan

pendekatan konfrontatif dengan Amerika Serikat (Recknagel, Iran: New President Represents Second Generation of Islamic Revolutionaries, 2005).

Para analis politik Amerika Serikat dan barat berpendapat bahwa Presiden Ahmedinejad merepresentasikan kelas revolusioner konservatif baru Iran. Yaitu kelompok masyarakat Iran veteran Perang Irak-Iran di tahun 1980 hingga tahun 1988. Generasi baru Konservatif ini dianggap lebih keras dan konfrontatif terhadap negara barat dan Amerika Serikat terutama menyangkut masalah nuklir Iran. Selain itu pernyataan keras Presiden Ahmadinejad mengenai kebenaran *holocaust* Holocaust adalah persekusi dan pembantaian sekitar enam juta orang Yahudi yang dilakukan secara sistematis, birokratis dan disponsori oleh rezim Nazi beserta para kolaboratornya. "Holocaust" berasal dari bahasa Yunani yang artinya "berkorban dengan api." Nazi, yang mulai berkuasa di Jerman pada bulan Januari 1933, meyakini bahwa bangsa Jerman adalah "ras unggul" sedangkan kaum Yahudi dianggap "inferior," yaitu ancaman luar terhadap apa yang disebut dengan masyarakat rasial Jerman (Ensiklopedia Holocaust) menimbulkan reaksi keras dari pemerintah Israel dan negara barat. Reaksi ini memperkuat persepsi buruk para pengambil keputusan negara barat dan Amerika Serikat terhadap Presiden Ahmadinejad. Persepsi buruk ini kemudian berpengaruh terhadap bagaimana negara-negara tersebut melihat program nuklir Iran (Recknagel, Iran: New President Represents Second Generation of Islamic Revolutionaries, 2005). Pergantian pemerintahan di Iran tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kebijakan nuklir Iran ataupun terhadap proses negosiasi yang sedang berlangsung baik dengan IAEA ataupun negara-negara

Barat (Recknagel, Iran: Election Of Ahmadinejad Unlikely To Affect Nuclear Negotiations , 2005).

Pada bulan yang sama setelah resmi menjabat sebagai presiden, dalam sebuah pertemuan dengan Sekjen PBB Kofi Annan Presiden Ahmadinejad menjelaskan niatnya untuk melanjutkan proses negosiasi dengan negara-negara Eropa terutama UE3 segera setelah pemerintahannya resmi terbentuk. Presiden Ahmadinejad juga menegaskan konsistensi Iran untuk meneruskan program nuklirnya (nti.org, 2005) Dalam sebuah pidato resmi di sidang umum PBB tanggal 18 September 2005, Presiden Ahmadinejad menyampaikan bahwasanya terdapat negara-negara Adidaya yang menghalangi secara terang-terangan akses terhadap teknologi nuklir Iran yang damai. Menurut Presiden Ahmadinejad, negara-negara ini salah dalam mempersepsikan niat dan tujuan Iran sehingga menggunakan propaganda yang mendeskripsikan program nuklir damai milik Iran. Presiden Ahmedinejad kemudian mengundang negara-negara maupun perusahaan swasta secara terbuka untuk ikut berpartisipasi membantu program nuklir Iran. Hal tersebut dilakukan sebagai sarana untuk *Confidence Building Measures* (news.bbc.co.uk, 2005).Pemimpin Agung Iran Ayatullah Ali Khamenei yang menyatakan bahwa Iran tidak memiliki niat untuk membuat bom nuklir, dan bahwa Amerika Serikat telah memberikan informasi yang keliru dan menyesatkan publik, seperti dikutip sebagai berikut (Smith, 2005)

*“Our governments and I myself have said numerous times that we are not seeking nuclear weapons. The uranium enriched in Iran is only enriched three to four percent, whereas for a nuclear bomb uranium must be enriched 94 to 95 percent.”*

Pernyataan Pemimpin Agung tersebut mencerminkan konsistensi kebijakan nuklir Iran yang meskipun telah mengalami beberapa kali pergantian pemerintahan, dari era Presiden Rafsanjani, Presiden Khatami, sampai dengan Presiden Ahmadinejad tidak mengalami perubahan signifikan. Presiden Ahmadinejad juga menegaskan kembali bahwa program nuklir Iran memiliki tujuan damai, dan bahwa sebenarnya negara-negara Adidaya dan negara penjajah yang memiliki senjata nuklir sebagai ancaman stabilitas yang sesungguhnya bagi kawasan Timur Tengah, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

*"We too demand that the Middle East be free of nuclear weapons, not only in the Middle East, but the whole world should be free of nuclear weapons."* (News, 2006)

Program nuklir sebagai kepentingan nasional dapat dilihat sebagai bagian dari kerangka pembangunan jangka panjang Iran jangka waktu 20 tahun (*Iran's 20year vision plan*) dan secara keseluruhan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan 5tahun (*5-year development plan*). Pemimpin Agung Iran Ayatullah Khamenei melihat program nuklir sebagai bagian besar Revolusi 1979. Program nuklir Iran dipandang merepresentasikan perjuangan kemerdekaan, ketidak adilan pihak asing, perlunya sebuah kemandirian (*self sufficient*), dan rasa percaya diri yang tinggi akan ilmu pengetahuan (Sadjadpour, 2008)

### **C. Non Proliferation Treaty (NPT) dan Penerapan Terhadap Iran**

Pada tahun 1953 Presiden AS Dwight Eisenhower berkampanye bahwa atom untuk perdamaian merupakan awal harapan untuk tidak menggunakan senjata pemusnah masal. Seiring dengan berjalannya waktu, ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni



Soviet (blok barat dan blok timur) semakin berkurang. Kedua negara mulai sadar akan dampak bahaya peperangan dan penggunaan senjata nuklir. Banyak negara lain menghendaki perdamaian dan mengharapkan negara-negara yang memiliki senjata nuklir tidak mengoperasikan dan mendistribusikan senjata tersebut. Salah satu negara yang sangat peduli akan bahaya senjata nuklir adalah Irlandia. Pada tahun 1961, Irlandia mengusulkan pada kedua negara adidaya agar melakukan perundingan untuk sebuah perjanjian pembatasan kepemilikan senjata nuklir. Kedua negara adidaya akhirnya bersepakat untuk melakukan perundingan-perundingan untuk mengurangi dampak bahaya senjata nuklir.

Pada musim gugur tahun 1965, Amerika Serikat dan Uni Soviet merealisasikan rencana mereka untuk menahan diri dari pengembangan senjata nuklir dengan mengajukan *Non-Proliferation Treaty* (NPT) kepada PBB. Dunia internasional pun mendapat kabar baik dengan kesepakatan perundingan yang diinisiasi kedua negara tersebut. Akhirnya, pada 1 Juli 1968 usulan tersebut benar-benar direalisasi dan NPT ditandatangani oleh Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet dan 59 negara lainnya.

Secara global rezim pengendalian senjata nuklir terdiri dari beberapa perjanjian, yang dapat dijelaskan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama terdiri dari perjanjian antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang mengatur mengenai pembatasan jumlah persenjataan nuklir kedua negara. Perjanjian tersebut meliputi perjanjian *Anti Ballistic Missile* (ABM) dan *Strategic Arms Reduction Treaty* (START). (Krass, 1997) Sedangkan bagian yang kedua terdiri dari sejumlah perjanjian yang bertujuan untuk membatasi

pengembangan teknologi nuklir oleh seluruh negara, yaitu perjanjian *Comprehensive Test Ban Treaty* (CTBT) dan *Non Proliferation Treaty* (NPT). Kedua perjanjian terakhir dapat dikatakan merupakan perjanjian yang paling signifikan dikarenakan keseriusan dan peraturan-peraturan komprehensif yang tertuang ke dalam perjanjian tersebut. (Krass, 1997, p. 32)

Secara garis besar isi perjanjian pembatasan kepemilikan nuklir terdiri atas tiga bagian:

1. Perjanjian non-proliferasi nuklir (NPT) tentang kesepakatan untuk tidak menjual senjata nuklir atau memberikan informasi tentang persenjataan nuklir kepada negara-negara yang tidak mengembangkan senjata nuklir;
2. Perjanjian pembatasan senjata-senjata strategis (*Strategic Arms Limitation Talks*, SALT) 1972. Hasil dari perjanjian ini adalah pembatasan kepemilikan senjata nuklir;
3. Perjanjian pengurangan senjata-senjata strategis (*Strategic Arms Reduction Treaty*, STAR) tahun 1982 antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hasil dari perjanjian ini adalah pemusnahan nuklir dengan daya nuklir berjarak menengah.

NPT terdiri dari sepuluh pasal yang kesemuanya terfokus pada upaya-upaya pembatasan penyebaran senjata nuklir dan juga mengeliminir kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana perang nuklir. Namun demikian, dalam pasal IV, perjanjian tersebut

memperbolehkan sebuah negara untuk memiliki program nuklir yang memiliki tujuan damai, seperti energi nuklir untuk tujuan sipil. Sebagai tambahan bagi upaya untuk non proliferasi secara horizontal, perjanjian ini juga bertujuan untuk menyediakan landasan bagi upaya-upaya non proliferasi vertikal sesuai pasal VI, yang menyebutkan bahwa negara yang memiliki senjata nuklir, diharuskan untuk secara bertahap mengurangi jumlah senjata nuklir mereka. Perjanjian tersebut juga menetapkan suatu sistem pengamanan (safeguard system) dibawah tanggung jawab *International Atomic Energy Agency* (IAEA) organisasi internasional bentukan PBB yang memiliki peran sentral dalam pengawasan program nuklir damai dan transfer teknologi untuk maksud damai. Pembentukan IAEA oleh PBB sendiri dimaksudkan agar kesepakatan dalam NPT dapat berjalan, dimana IAEA memiliki fungsi sebagai instrumen yang bertugas memverifikasi keamanan proyek nuklir suatu negara. Selain memeriksa laporan negara yang memiliki program nuklir, IAEA juga melakukan inspeksinya sebagai peninjau dengan cara memasang kamera-kamera pemantau jarak jauh pada fasilitas-fasilitas nuklir suatu negara.

Perjanjian non proliferasi nuklir yang diratifikasi pada tahun 1970 ini kemudian mengelompokkan negara-negara ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok Negara-negara yang telah melakukan uji coba senjata nuklir sebelum tahun 1968 dan kelompok negara-negara yang belum pernah melakukannya sebelum tahun 1968. Negara-negara nuklir (*Nuclear Weapon States/NWS*) dan negara-negara non-nuklir (*Non-Nuclear Weapon States/NNWS*). NPT pada dasarnya adalah komitmen dari kelima negara NWS yaitu: Perancis, Republik Rakyat Tiongkok, Britania Raya, Uni Soviet dan Britania Raya untuk mewujudkan pembatasan senjata nuklir dan komitmen negara-negara NNWS untuk

tidak mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir. Iran merupakan salah satu negara anggota yang komitmen untuk mengikuti perjanjian non-proliferasi nuklir. Sebagai negara NNWS, Iran harus patuh untuk tidak mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir

Sesuai dengan pasal ke IV perjanjian NPT, Iran berhak mendayagunakan teknologi nuklir untuk kepentingan-kepentingan damai. Bahkan, negara-negara lain yang juga memiliki teknologi nuklir berkewajiban untuk membantu negara negara yang belum memiliki teknologi nuklir tersebut. Sebagai bentuk kepatuhan Iran terhadap NPT, Iran selalu melaksanakan kewajibannya kepada IAEA dan oleh karenanya Iran dianggap berhak memiliki dan mengembangkan teknologi nuklir sipil. Perjanjian non-proliferasi nuklir ini terbuka untuk ditandatangani pada 1 Juli 1968, dimana pada waktu itu perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh AS, Inggris, Uni Soviet, dan 59 negara lain, dan dinyatakan berlaku mulai tanggal 5 Maret 1970 (Krass, 1997, p. 32). Iran menandatangani NPT pada tahun 1968, dan meratifikasinya pada 1970. Duta Besar Iran untuk PBB, Mohammad Javad Zarif, Iran menjalankan program pengembangan nuklirnya sesuai dengan perjanjian NPT dan tidak pernah menolak pengawasan tim inspeksi IAEA atas semua aktivitas nuklirnya.

Konsep NPT ini justru ditujukan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dengan mengupayakan agar negara-negara nuklir melakukan pelucutan senjata secara menyeluruh. Bahkan pengawasan IAEA yang bertanggung jawab untuk mengawasi nuklir juga tidak melakukan pengawasan secara ketat bagi negara-negara nuklir. Pengawasan yang dilakukan IAEA cenderung mengarah kepada tindakan pencegahan terhadap negara-negara yang belum memiliki nuklir dan ingin atau baru sebatas mencoba memulai

program nuklir untuk tujuan-tujuan sipil. Padahal bukan tidak mungkin penyebaran nuklir dilakukan oleh negara-negara yang telah memiliki kemampuan nuklir itu sendiri dengan tujuan untuk menghindari perhatian IAEA terhadap negara-negara Klub nuklir sehingga mereka bebas mengembangkan nuklirnya. Pada tahun 1970-an, NPT cenderung diterima oleh semua negara maju dan mayoritas negara berkembang, perkembangan energi nuklir kemudian meningkat dramatis. Teknologi nuklir menjadi semakin matang dan tersedia dengan mudah. Ketika terjadi krisis minyak pada tahun 1973 energi nuklir menjadi pilihan yang lebih menarik, sehingga peran IAEA menjadi semakin penting.

Tim inspeksi IAEA secara rutin mengunjungi fasilitas-fasilitas nuklir Iran berdasarkan NPT. Sebagai negara yang turut menandatangani NPT, Iran berkewajiban melaporkan semua program pengembangan nuklirnya kepada IAEA. Semua instalasi nuklir Iran diawasi secara ketat dan intensif oleh IAEA. Dalam inspeksinya diharapkan IAEA dapat memberikan laporan yang intinya menjamin bahwa Iran tidak melanggar NPT, memastikan bahwa pengembangan nuklir Iran benar-benar untuk tujuan sipil, untuk tujuan damai dan tidak akan membahayakan stabilitas keamanan dan perdamaian dunia (Agency)

Sebagai Badan Pengawas Nuklir, IAEA memiliki kewenangan untuk melaporkan negara yang terikat dalam NPT kepada Dewan Keamanan PBB, apabila negara tersebut dianggap tidak transparan dan tidak bekerjasama serta tidak melibatkan IAEA dalam program nuklirnya. Laporan IAEA kepada DK-PBB ini juga dapat dilakukan apabila masalah nuklir yang ada dianggap dapat membahayakan perdamaian dunia. Setiap kegiatan pengayaan nuklir memang memiliki potensi untuk menimbulkan perhatian

internasional terhadap proliferasi. Namun demikian, terdapat mekanisme yang disetujui secara internasional untuk menangani permasalahan-permasalahan seputar program nuklir termasuk pengadaan bahan bakar nuklir. Mekanisme tersebut termasuk kedalam program pencegahan IAEA dan protokol tambahan NPT (Agency). Argumen yang seringkali digunakan oleh negara-negara barat dan Amerika Serikat mengenai program nuklir Iran adalah mempertanyakan tujuan program nuklir Iran yang selama ini dianggap disembunyikan dari publik dengan tidak dipublikasikan.

Gambar 2.1 Peta Jarak Amerika Serikat dengan Iran

